

DIMENSI MASALAH SOSIAL, SOSIOLOGIS, DAN SOSIETAL DI PAPUA

Oleh : Retor AW Kaligis*

Abstract

The problem of separatism in Papua has not go down, even in the year 2011 showed an increase escalation. After repression era of the New Order ends, special autonomy runs in Papua. But 10 years after the Special Autonomy Law was enacted and many of the funds have been disbursed in Papua, justice has not felt the majority of people there.

Although Papua has a rich natural resource, the majority of the people of Papua are still lagging. The low quality of people life has risen to various social and sociological problems. Finally, social and sociological problems involved contributes to the strengthening of societal problems, ie concerning the sustainability of the existence of society itself. In this case, the problem was related to social construct of Indonesia in Papua. It needs to maintain the integrity of the Unitary State of Indonesia Republic (NKRI) with local and national stability as well as to eliminate social, sociological, and societal problems.

Keywords: social problem, sociological problem, societal problem, Papua

Abstrak

Masalah separatisme di Papua tidak kunjung reda, bahkan di tahun 2011 menunjukkan peningkatan eskalasi. Setelah era represi Orde Baru berakhir, otonomi khusus berjalan di Papua. Tapi 10 tahun setelah diterbitkan UU Otonomi Khusus dan banyak dana dikucurkan di Papua, keadilan belum dirasakan mayoritas orang di sana.

Meskipun Papua memiliki sumber daya alam yang kaya, mayoritas rakyat Papua masih tertinggal. Rendahnya kualitas hidup manusia menyebabkan peningkatan berbagai masalah sosial dan sosiologis. Akhirnya, masalah sosial dan sosiologis memberi andil bagi menguatnya masalah sosietaI, yakni masalah yang menyangkut keberlangsungan eksistensi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, masalah tersebut menyangkut bangunan sosial keindonesiaan di tanah Papua. Diperlukan usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hanya dengan menjaga stabilitas lokal dan nasional, tapi sekaligus mengeliminasi masalah-masalah sosial, sosiologis, dan sosietaI.

Kata Kunci: masalah sosial, masalah sosiologis, masalah sosietaI, Papua

1. Pendahuluan

Setelah pemberian otonomi khusus, persoalan separatisme di Papua tak kunjung mereda. Bahkan pada tahun 2011, eskalasinya menunjukkan peningkatan. Arus penolakan terhadap otonomi khusus semakin muncul di permukaan. Pendekatan keamanan memang tidak dapat diabaikan untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tapi harus disadari bahwa hal tersebut tidak dapat mengurai dan mengatasi akar persoalan di Papua.

Ketika awal reformasi, pada 29 Mei-1 Juni 2000, Kongres Rakyat Papua diselenggarakan di Jayapura. Kongres tersebut menegaskan

perjuangan PDP (Presidium Dewan Papua) untuk mengembalikan kedaulatan Papua Barat 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 dianggap sebagai tonggak sejarah oleh mereka karena pada saat itu sejumlah tokoh Papua Barat sempat memproklamasikan kemerdekaan. Usaha itu dianulir Presiden Soekarno melalui Trikora (Tri Komando Rakyat) pada 19 Desember 1961 karena wilayah tersebut dianggap merupakan bagian integral dari Indonesia dan negara Papua disebut sebagai negara boneka hasil ciptaan kolonial Belanda.¹

¹. Pada tanggal 2 Januari 1962, sebagai tindak lanjut Trikora, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit No. 1/1962 tentang

Ketua PDP (Presidium Dewan Papua) Theys Hiyo Eluay dianggap sebagai aktor sentral penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua. Theys ditemukan tewas hari Minggu, 11 Nopember 2001, setelah sehari sebelumnya diculik se usai mengikuti upacara Hari Pahlawan. Namun tewasnya Theys tidak menyurutkan tindakan separatisme pendukungnya. Keadaan justru semakin memanas pasca kematiannya. Di mata banyak kalangan di masyarakat Papua, Theys adalah tokoh yang kharismatik yang mampu mempersatukan 250 suku-suku di Irian Jaya untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka.²

Kekerasan struktural atau kekerasan sistemik di Papua merupakan operasionalisasi dari model *authoritarian bureauractic* yang dianut Indonesia pada masa Orde Baru di mana dampaknya masih terasa sampai sekarang. Model *authoritarian bureauractic* atau sering diterjemahkan dengan birokratik otoriter, merupakan lawan dari demokrasi, yaitu suatu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaan dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok. Termasuk di dalamnya adalah bergabungnya kelompok militer.³

Kekuasaan kelompok militer sangat besar, terutama untuk mengontrol dan menindas masyarakatnya. Sedangkan masyarakat sendiri tidak memiliki peluang untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, peluang-peluang secara struktural dalam sistem birokratik otoriter ini, kekerasan sering sekali dilakukan, terutama untuk menciptakan tertib politik.

Di masa Orde Baru, proses indonesianisasi banyak dilakukan melalui kekerasan struktural, yang secara sistematis menyumbat akses dan kontrol dari masyarakat Papua terhadap sumber-sumber daya yang ada, baik sumber daya ekonomi, politik, alam, maupun budaya.

Pada era reformasi, pendekatan keamanan berganti menjadi pendekatan kesejahteraan melalui UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut berusaha mengakomodir sejumlah tuntutan masyarakat Papua, antara lain lain pembangunan yang adil dan penghormatan HAM.

Namun 10 tahun setelah pelaksanaan otonomi khusus, persoalan separatisme tidak

kunjung surut dan bahkan banyak yang menolak otonomi khusus di wilayah tersebut.

2. Perumusan Masalah

Dari persoalan tersebut masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana masalah mendasar dari suatu bangunan sosial yang terbentuk di Papua sejak berada di pangkuan ibu pertiwi hingga 10 tahun pelaksanaan otonomi khusus yang mengancam keberlangsungan eksistensi NKRI?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah:

Untuk memperoleh pemahaman tentang akar masalah integrasi di Papua, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan konflik vertikal di Papua, dan bagaimana model penanganan masalah integrasi yang efektif di Papua?

3. Metodologi Penelitian

3.1. Pendekatan Teoritis

3.1.1. Kegagalan Sentralisme Kekuasaan

Dalam konsep Guillermo O’Donnell⁴, Negara Birokratik Otoriter (NBO) memiliki karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, posisi-posisi puncak pemerintahan biasanya dijabat oleh orang-orang yang sebelumnya telah berhasil ketika mereka berada dalam organisasi birokrat, seperti organisasi militer. Bahkan dalam kenyataannya tidak jarang dijumpai keadaan bahwa pemerintah hampir sepenuhnya dikendalikan oleh militer sebagai sebuah lembaga yang bekerja sama dengan teknokrat sipil.

Kedua, dalam NBO akan selalu ada pembatasan partisipasi politik yang ketat (*political exclusion*). Para penguasa menindas hak-hak politik rakyat, mereka memotong dan menutup saluran penyampaian aspirasi politik yang diperlukan oleh masyarakat banyak.

Ketiga, dalam NBO juga ada pembatasan yang ketat dalam partisipasi ekonomi (*economic exclusion*). Negara bersama para pengusaha domestik yang menjadi *client*-nya dan masyarakat usaha internasional hampir sepenuhnya mengendalikan ekonomi negara.

Keempat, negara mengembangkan kebijakan depolitisasi dan demobilisasi massa. Kebijakan perumusan dan pengambilan keputusan politik lebih bersifat teknokratis dan birokratis, yang oleh karena itu lebih berkecenderungan untuk tidak

pembentukan Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Lihat, Cholil, M. *Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat* (Jakarta, Pusat Sejarah ABRI, 1971) h.23.

² *Suara Pembaruan*, 12 Nopember 2001.

³ Nusa Bhakti, Ikrar, et.al. *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru* (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), h.35.

⁴ Lihat Suwarsono dan Alvin Y. So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2000) h. 151-152.

secara hati-hati memperhatikan kepentingan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.

Secara ringkas, NBO dicirikan oleh adanya peran dominan para birokrat, khususnya militer, yang daripadanya lahir kebijakan pembatasan politik dan ekonomi, serta muncul kebijakan depolitisasi dan demobilisasi.

Sedangkan menurut Mohtar Mas'ood, disamping ciri-ciri NBO yang disebutkan O'Donnell ada satu lagi karakteristik yang khas dari model NBO di Indonesia pada zaman Orde Baru, yakni wewenang dan kekuasaan kantor kepresidenan Indonesia yang hampir otonom dan memiliki jangkauan yang luas.⁵

Nasionalisme awalnya dibangun untuk melawan kolonialisme, tetapi di sisi lain tradisi dan warisan sosial kolonialisme masih melekat, sehingga usaha untuk menjaga keutuhan negara-bangsa sering dilakukan dengan sistem kekuasaan yang sentralistik, otoriter, dan mengabaikan kepentingan lokal. Bagi negara-negara bekas jajahan, yang disatukan secara geografis dan masyarakatnya berdasarkan warisan kolonial, mereka harus menghadapi persoalan identitas nasional yang lebih rumit, yang dapat membuat negara-bangsa kehilangan kohesi internalnya.

David Brown berpendapat, usaha integrasi nasional seringkali mengalami kegagalan sebab mesin negara tidak cukup memadai untuk pencapaian kontrol terpusat yang efektif atas teritorinya.⁶ Kekuasaan otoriter akhirnya tidak mampu bertahan terus-menerus. Pada era reformasi, sebagai reaksi terhadap sentralisasi kekuasaan Orde Baru, di daerah-daerah yang marak justru tuntutan otonomi, otonomi khusus, federasi, hingga keinginan merdeka.

3.1.2. Masalah Sosial, Sosiologis, dan Sosietal

Masalah sosial adalah berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan moral, yang menyangkut ukuran-ukuran masyarakat apa yang dianggap baik dan buruk.⁷ Misalnya, pencurian dan pelacuran. Sedangkan masalah sosiologis, yakni masalah menyangkut struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial yang menjadi merupakan masalah besar karena terakumulasi secara terus-menerus di masyarakat. Hal itu,

misalnya, keadaan sosial-ekonomi penduduk asli Papua lebih rendah ketimbang pendatang.

Adapun masalah sosietal (*societal problems*) adalah masalah yang mendasar dari suatu bangunan sosial, yang terancam adalah keberlangsungan eksistensi dari masyarakat itu sendiri. Masalah sosietal lebih berat dari masalah sosial dan masalah sosiologis, menyangkut ancaman disintegrasi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah sosietal, harus mampu diidentifikasi gejala-gejala yang menyebabkan disintegrasi, akar masalahnya, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa lalu. Misalnya: kebijakan Depdagri tentang struktur kekuasaan daerah yang menyebabkan bertabraknya dengan kekuasaan adat, kebijakan Departemen Transmigrasi yang memindahkan orang begitu saja tanpa melakukan studi mendalam sehingga melahirkan benih-benih konflik yang terus-menerus terakumulasi. Atau, Departemen Pekerjaan Umum melakukan pembangunan fisik yang tidak adil, proyek pembangunannya tidak menjangkau secara merata, dan Departemen Penerangan yang hanya menjadi corong pemerintah, dan sebagainya.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka menjelaskan makna yang berlaku pada situasi dan kondisi yang sedang dipelajari. Penelitian menggunakan Studi Pustaka, dimana dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan interpretasi sosial, kultural, dan politik yaitu pengolahan dan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti. Pada tahap penyajian data, disajikan hasil analisis tentang dimensi masalah sosial, sosiologis, dan sosietal, dari kekerasan struktural di Papua.

4. Pembahasan: Kekerasan Struktural dan Relasinya Dengan Masalah Sosial, Sosiologis dan Sosietal

Proses kekerasan struktural di Papua sebetulnya telah dimulai beberapa tahun sebelum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969. Pada masa itu ada beberapa peristiwa penting yang sangat traumatik bagi rakyat Papua yang menjadi awal proses teralienasinya mereka di tanahnya sendiri. Indonesia saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi yang juga berdampak pada wilayah Irian Barat. Keadaan itu membuat para pejabat militer dan sipil yang

⁵ *Ibid*, h. 158.

⁶ Brown, David. *Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural and Multicultural Politics*, London: Routledge, 2000, h. 40-1.

⁷ Merton, Robert K. dan Robert A. Nisbet (ed). *Contemporary Social Problems and Introduction to the Sociology of Deviant Behavior and Social Disorganization*, Harcourt Brace & World Inc. 1961, h. 12.

bertugas di Irian Barat membawa barang-barang dari Irian Barat ke wilayah Indonesia lainnya. Timbulah anggapan bahwa orang Indonesia merampok kekayaan orang Irian.⁸

Pada masa ekonomi yang sulit saat itu, harga barang-barang di Irian Barat melambung tinggi. Meskipun ada kebijakan dua bentuk mata uang rupiah, yaitu rupiah biasa dan rupiah IB (Rupiah Irian Barat) yang nilainya sepuluh kali lipat dari rupiah biasa, rakyat yang tidak bekerja tak mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti pada Belanda dulu. Hal tersebut menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial, seperti terjadi di Manokwari, Biak, Yapen-Waropen, dan Sukarnapura (sekarang Jayapura).⁹

Kerusuhan-kerusuhan tersebut dihadapi dengan kekerasan militer, sehingga disamping menimbulkan trauma yang mendalam bagi penduduk juga membangkitkan semangat untuk merdeka. Pada tahun 1963 mulai terdengar istilah OPM (Organisasi Papua Merdeka).¹⁰

Kekerasan struktural juga terjadi dalam bidang administrasi pemerintahan sipil ketika para pegawai administrasi sipil asli Papua mulai digeser dan diganti dengan orang-orang yang berasal dari luar Papua, baik karena alasan politis maupun pertimbangan kapasitasnya sebagai administrator.

Selama kurun waktu antara tahun 1969 hingga tumbangnya penguasa Orde Baru Soeharto tahun 1998, watak NBO rezim Orde Baru tampak pada kebijakannya dalam penanganan bidang ekonomi dan sumber daya alam di Papua, di mana terjadi pengurangan kekayaan Irian Jaya oleh Pemerintah Pusat. Bumi Cendrawasih merupakan daratan dan lautan yang kaya. Di dalamnya terkandung kekayaan alam yang besar, dari kekayaan hutan, tambang tembaga dan emas, minyak dan gas, hingga kekayaan laut. Salah satu contohnya adalah Freeport Indonesia yang memiliki pendapatan per hari sekitar 3 juta dolar AS.¹¹

Ironisnya, di tengah potensi kekayaan alamnya, sebanyak 1.738 (80%) desa dari sekitar 2.000 desa di Irian Jaya termasuk desa miskin dan masuk Program Inpres Desa Tertinggal. Hal lain yang juga sangat ironis adalah hutan Irian Jaya

yang 70% merupakan hutan tropis dan menjadi penyangga ekologis, tempat masyarakat hidup berkebun dan berburu, ternyata telah dikapling-kapling dalam bentuk HDGT (Hak Dari Guna Tanah). Seluas 22 juta hektar, atau sekitar 54% dari luas hutan yang ada di Irian Jaya adalah hutan produksi.¹² Sedangkan masyarakat asli merasa tidak diperhatikan hak-hak adat yang telah berlaku di sana selama turun-temurun.

Penyumbatan akses ekonomi dan tidak dihormati hak adat menimbulkan berbagai reaksi perlawanan di masyarakat Papua. Reaksi atas ketidakadilan itu dihadapi dengan lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*).

Selama masa Orde Baru, operasi-operasi militer tidak jarang menimbulkan berbagai pelanggaran HAM baik dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pembumihangusan desa, dan sebagainya. Operasi-operasi militer dilakukan di berbagai wilayah Papua, khususnya di wilayah-wilayah tempat terjadinya gerakan-gerakan bersenjata OPM, seperti di Manokwari, Biak, Sorong, dan daerah pertambangan Freeport.

Memang, di era reformasi pemerintah pusat memberi perhatian melalui penerapan UU Otonomi Khusus. Kucuran dana otonomi khusus ke Papua luar biasa besar dibandingkan ke daerah lain di Indonesia. Dana otonomi khusus 2011 senilai 28,2 triliun dan akan bertambah lebih dari Rp 4 triliun tahun 2012.¹³

Namun 10 tahun setelah UU Otonomi Khusus diberlakukan dan banyak dana dikucurkan di Papua, keadilan belum dirasakan mayoritas masyarakat di sana. Data Badan Pusat Statistik Papua 2010 menyebutkan, ada 2.333 rumah sakit. Puskesmas bertambah dari 991 unit pada 2008 menjadi 1.026 unit pada 2009. Jumlah dokter dari 481 orang menjadi 574 orang, dan paramedis dari 5.021 orang menjadi 5.506 orang. Tapi data itu tak berarti banyak bila dicek di lapangan. Banyak puskesmas lebih sering ditinggal dokter dan puskesmas pembantu tak ada tenaga kesehatannya. Gedung sekolah berdiri, tetapi sulit mencari guru yang mau tinggal di pedalaman. Jumlah orang miskin bertambah, dari 761.000 jiwa lebih (2010) menjadi 944.000 orang per Maret 2011 meski persentasenya turun dari 36

⁸ Nusa Bhakti, Ikrar, *et.al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, *op.cit.*, h. 254.

⁹ Penjelasan lebih jauh tentang kerusuhan sosial tersebut, lihat Natalis Pigay BIK, Decki. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 2000, Bab VI.

¹⁰ Istilah tersebut diberikan oleh penguasa militer Indonesia. *Ibid*, Bab VI.

¹¹ *Kompas*, 22 Februari 2000

¹² *Kompas*, 25 Nopember 2001

¹³ "Membangun Papua: Dari Otsus 'Terbitlah' UP4B", *Kompas*, 4 Nopember 2011, h. 46.

persen menjadi 31 persen pada 2010 dari total penduduk 2.833.381 orang.¹⁴

Rendahnya kualitas hidup masyarakat menimbulkan berbagai masalah sosial. Pemakaian minuman keras (miras) di Papua terus meningkat. Di Jayapura, misalnya, hal itu dapat dilihat dari pasokan retribusi miras setiap tahun yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 -2003 pasokan retribusi pemerintah daerahnya sebesar Rp 1,4 milyar, tahun anggaran 2006 mengalami peningkatan menjadi Rp 3 milyar.¹⁵

Padahal menurut pengakuan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Drs. Daud Sihombing SH, "Dari catatan polisi pada setiap laporan akhir tahun, semua kejadian kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, teror dan seterusnya berawal dari miras. Miras ini membuat orang menjadi pemalas, bermental santai tetapi ingin mendapat untung besar, dan semangat belajar para siswa sekolah pun menurun."¹⁶ Belum lagi dilihat dari masalah penyalahgunaan narkoba yang terus mengalami peningkatan signifikan.¹⁷

Keterbelakangan masyarakat Irian Jaya dalam pembangunan bermuara pada masalah sosiologis, yakni masalah menyangkut struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial yang menjadi masalah besar karena terakumulasi secara terus-menerus di masyarakat.

Masyarakat Papua tertinggal dari propinsi-propinsi lainnya. Rendahnya kualitas hidup masyarakat di sana dibandingkan propinsi lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga macam indeks: indeks angka harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata jam sekolah), dan indeks daya beli.

¹⁴ "Papua: Saat Menepati Janji-Janji", *Kompas*, 4 Nopember 2011, h. 45.

¹⁵ *Suara Perempuan Papua*, No. 32 Tahun II, 20-26 Maret 2006.

¹⁶ *Kompas*, 17 November 2003.

¹⁷ Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua JV Purwoatmodjo mengatakan, peningkatan penyalahgunaan ini terus meningkat bila dibandingkan dengan angka prevalensi tahun 2004 yang sebesar 1,75 persen. Data bidang penegakan hukum mencatat, angka kasus kejahatan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada 2006 sebanyak 3.135 kasus dan 2010 menjadi 9.222 kasus. "Ada kenaikan rata-rata sebesar 32,95 persen per tahun dengan jumlah tersangka pada 2006 sebanyak 5.045 orang dan pada 2010 menjadi 12.417 orang sehingga mengalami peningkatan sebesar 27,75 persen per tahun," kata Purwoatmodjo. "Peredaran Narkoba di Papua Makin Meningkat". *Tribun-Timur.Com*, <http://makassar.tribunnews.com/2011/07/15/peredaran-narkoba-di-papua-makin-meningkat>, 15 Juli 2011.

Semakin tinggi nilai IPM maka semakin baik kualitas hidup manusianya.

Pada awal reformasi, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), IPM di Irian Jaya tahun 1999 menempati urutan ke-25 dari 26 propinsi.¹⁸ Sepuluh tahun kemudian, tahun 2009, IPM wilayah paling Timur di Indonesia ini, yang kemudian dipecah menjadi 2 propinsi (Papua dan Papua Barat) tetap tidak beranjak jauh. IPM Papua paling rendah, berada di posisi 33 dari 33 propinsi, Adapun Papua Barat di peringkat 30.¹⁹

Modernisasi yang menerpa kawasan ini, seperti dengan adanya pertambangan Freeport, umumnya dikuasai para pendatang yang bekerja di sektor modern sedangkan mayoritas masyarakat Papua masih hidup dalam alam tradisional dan sektor informal/ usaha kecil. Seandainya bekerja di sektor modern, mereka umumnya berada pada posisi/ jabatan lapisan bawah.

Rendahnya sumber daya manusia berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal itu dapat dilihat dari bahaya *booming* penyakit HIV/AIDS. Kawasan ini rentan terhadap berbagai penyakit menular karena informasi yang kurang dan pendidikan kesehatan yang tidak memadai membuat Papua berada pada urutan ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta dan Bali dalam angka penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS. Padahal fasilitas pelayanan kesehatan di Papua jauh lebih terbatas ketimbang DKI Jakarta dan Bali, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di Kabupaten Mimika hanya selama bulan September 2001 jumlah orang yang terinfeksi HIV dan PMS yang terdata sebagai berikut: HIV positif 133 orang, positif gangguan reproduksi 414 orang –diantaranya 225 orang terkena PMS. Korban tidak hanya dari penjaja seksual dan "konsumen"-nya, tapi 87 orang diantaranya adalah ibu rumah tangga.²⁰ Hingga akhir Juni 2009, jumlah kasus HIV/AIDS di Mimika telah mencapai 2.005 kasus dan merupakan jumlah kasus yang tertinggi di Provinsi Papua bahkan di seluruh Indonesia.²¹

Persoalan PSK (Pekerja Seks Komersial) merupakan masalah sosial yang juga terjadi di

¹⁸ Lihat *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999: Seri Publikasi Susenas Mini 1999*, Buku 2. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2000.

¹⁹ Badan Pusat Statistik (BPS). *Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional 1996-2009*, 2010.

²⁰ *Suara Pembaruan*, 22 Nopember 2001

²¹ "Waspada, PSK Papua Mayoritas Kena HIV", *Berita2.com*, <http://www.berita2.com/daerah/maluku-papua/1448-waspada-ke-lokalisasi-psk-papua-mayoritas-kena-hiv.html>, 4 Nopember 2009.

propinsi-propinsi lainnya. Namun di Papua, PSK tidak hanya merupakan masalah sosial tapi juga dapat ditinjau dari kekhasan masalah sosiologisnya sebagai akibat perbenturan sektor modern dan tradisional yang memarginalkan masyarakat lokal.

Hasil survei yang dilakukan oleh FHI ASA (*Family Health International Aksi Stop Aids*) atas Papua menunjukkan penularan HIV/AIDS di Papua itu paling tinggi terjadi di daerah pedalaman karena di situlah bisnis berkembang. Bisnis kayu, terutama gaharu, berada di tengah hutan. Daerahnya begitu tertutup, tapi modernisasi masuk di situ. Jadi ada pertempuran antara kehidupan tradisional dan kehidupan modern yang terjadi di daerah tertutup. Tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah akses informasi, terutama tentang HIV/AIDS yang begitu minim, membuat masyarakat di wilayah terpencil itu sangat rentan terhadap penyakit ini. Beberapa hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga non-pemerintah sebelumnya menunjukkan bahwa di daerah pedalaman, potensi penularan terjadi akibat hadirnya kegiatan *logging* – penebangan kayu - yang biasanya dilakukan di hutan-hutan pedalaman, juga pertambangan. Di pesisir, ada kegiatan *fishing* atau penangkapan ikan dengan kapal-kapal ikan yang seringkali bersifat ilegal. Lokasi-lokasi bisnis demikian biasanya menghadirkan pula PSK (Pekerja Seks Komersial) yang didatangkan dari luar pulau.²²

Akhirnya, masalah sosial dan sosiologis ikut memberi andil bagi menguatnya masalah sosial (*societal problem*), yakni masalah yang menyangkut keberlangsungan eksistensi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, masalah tersebut menyangkut bangunan sosial keindonesiaan di tanah Papua.

Latar belakang ras masyarakat asli Papua yang berbeda dengan mayoritas warga negara Indonesia yang berasal dari ras Melayu dan riwayat integrasi Papua ke dalam NKRI memang membuat proses identitas keindonesiaan di Papua memerlukan penguatan lebih jauh. Namun, seperti

dikatakan Ketua Kaukus Papua di Parlemen, Paskalis Kossay, tuntutan pelurusan sejarah Papua oleh sebagian masyarakat Papua melalui referendum tidak akan muncul bila kesejahteraan merata dan penderitaan akibat pelanggaran HAM tidak ada lagi.²³

5. Kesimpulan dan Saran

Untuk mempertahankan keutuhan NKRI serta menjaga stabilitas lokal dan nasional, sekaligus untuk mengeliminir masalah sosial, sosiologis, dan sosial, paling tidak ada 3 hal penting yang harus dikerjakan untuk Papua.

Pertama, agar dialog antara pemerintah RI dan rakyat Papua harus semakin dikedepankan untuk menghasilkan kesamaan visi dan misi mengenai otonomi khusus. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa dukungan masyarakat Papua sendiri, sebab di tengah menguatnya tuntutan untuk merdeka maka mereka akan cenderung menolak pelaksanaan otonomi khusus. Untuk itu, penyamaan visi dan misi dihasilkan dari usaha membangun kepercayaan rakyat Papua terhadap masa depannya dalam wadah NKRI, antara lain menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan program penyembuhan trauma (*trauma healing*) akibat kekerasan struktural yang mereka alami selama beberapa puluh tahun.

Kedua, adanya jaminan tegas perbaikan nasib dan pemberdayaan rakyat Papua. Hal ini dilakukan melalui penghormatan hak-hak masyarakat terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi di wilayah tersebut yang selama ini tersumbat, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah yang bersih dan responsif, serta menghormati kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua. Sasarannya adalah terwujudnya sumber daya manusia setempat yang berkualitas, terwujudnya fungsi pelayanan pemerintah yang optimal, terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan, sekaligus menjamin terciptanya rasa cinta bangsa dan tanah air Indonesia.

Ketiga, pemerintah Indonesia harus lebih mengaktifkan diplomasi internasional agar dukungan internasional tetap kuat atas integritas teritorial RI. Sampai saat ini, negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia memang tetap menegaskan dukungannya, paling tidak secara formal, pada keberadaan Papua

²² Tak terhindarkan, ada penduduk setempat yang menjadi konsumen dari para pekerja seks yang sangat rentan terhadap HIV/AIDS ini. Bila seorang pria telah mengidapnya, ia akan menularkannya kepada istrinya. Dalam hubungan dengan PSK ini, Papua ternyata menjadi terminal terakhir dari perputaran jalur perdagangan wanita atau prostitusi. Baik yang berangkat dari Surabaya melalui jalur selatan maupun melalui jalur utara, semuanya berakhir di Papua dan selanjutnya terus beroskansi, kembali ke Surabaya. Ada lagi yang langsung dari Jawa, seperti dari Surabaya ke Timika atau Jakarta ke Timika. "Dari Gaharu Hingga Perilaku Berisiko", *reformata.com*, <http://www.reformata.com/index.php?m=news&a=view&id=1467&print=1>, 30 Nopember 2007.

²³ "Papua: Saat Menepati Janji-Janji", *Kompas*, 4 Nopember 2011, h. 45.

sebagai bagian NKRI. Namun demikian, pengalaman mengajarkan, intervensi internasional dari negara-negara lain bisa terjadi di Papua dengan alasan-alasan kemanusiaan, seperti yang pernah terjadi di Timor-Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Berita2.com, 4 Nopember 2009

Badan Pusat Statistik (BPS). *Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional 1996-2009*, 2010.

Brown, David (2000). *Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural and Multicultural Politics*, London: Routledge.

Cholil, M. *Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.

Fisher, Simon, *et.al. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta, 2000.

Kompas, 22 Februari 2000.

Kompas, 4 Nopember 2011

Merton, Robert K. and Robert A. Nisbet (eds) (1961). *Contemporary Social Problems and Introduction to the Sociology of Deviant Behavior and Social Disorganization*, Harcourt Brace & World Inc.

Natalis Pigay BIK, Decki. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua*. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Nusa Bhakti, Ikrar, *et.al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Mizan Pustaka, Bandung, 2001.

Reformat.com, 30 Nopember 2007.

Seri Publikasi Susenas Mini 1999, Buku 2. *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya*

1996-1999, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2000.

Suwarsono dan Alvin Y. So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2000.

Suara Pembaruan, 12 Nopember 2001

Suara Pembaruan, 22 Nopember 2001

Suara Perempuan Papua, No. 32 Tahun II, 20-26 Maret 2006.

Tribun-Timur.Com, 15 Juli 2011.

Zastrow, Charles. *Social Problems: Issues and Solution*, Wadsworth-Thomson Learning, 2000.

***Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.**

Menyelesaikan S1 di Jurusan Jurnalistik, FIKOM, Universitas Padjadjaran (1994), S2 Sosiologi, Manajemen Pembangunan Sosial-FISIP, Universitas Indonesia (2003), dan S3 Sosiologi-FISIP, Universitas Indonesia (2010). Ia aktif sebagai Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara, organisasi kajian yang menggali akar sosio-historis Nusantara untuk membahas fenomena kemasyarakatan aktual di Indonesia.

Email: retor_awk@yahoo.com

"Mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya."

George Santayana
(1863–1952), filsuf
Amerika Serikat"